



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

<https://disnaker.batam.go.id>

Jl. Raja Haji no. 1 Sungai Harapan - Sekupang

Tahun 2025



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 115 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - e. BAB V. PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
- b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD Tahun 2025; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

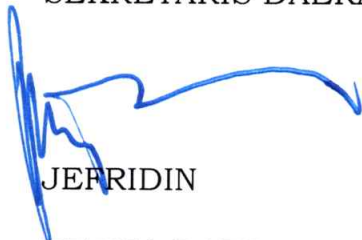
WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 31 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1455

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 18 Juli 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Rudi Sakyakirti, SH., MH
NIP.19650606 199303 1 018

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Gambar	iv
Daftar Table	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II.....	7
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA	7
DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU.....	7
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.....	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	23
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	23
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	24
2.3.3 Peluang dan Tantangan.....	26
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III.....	45
TUJUAN DAN SASARAN.....	45

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM.....	45
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.....	47
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	48
BAB IV.....	62
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	62
BAB V.....	71
PENUTUP	71

Daftar Gambar

Gambar 1 - Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	2
Gambar 2 - Keterkaitan Renja Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3

Daftar Table

Table 1 (2.1) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2024.....	8
Table 2 (2.2) Pencapaian Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	22
Table 3 (2.3) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	32
Table 4 (2.4) Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025	39
Table 5 (3.1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	47
Table 6 (3.2) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	53
Table 7 (4.1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dengan Undang-undang ini kita mengenal satu bagian penting dari perencanaan daerah yaitu rencana pembangunan daerah, diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai kelengkapannya.

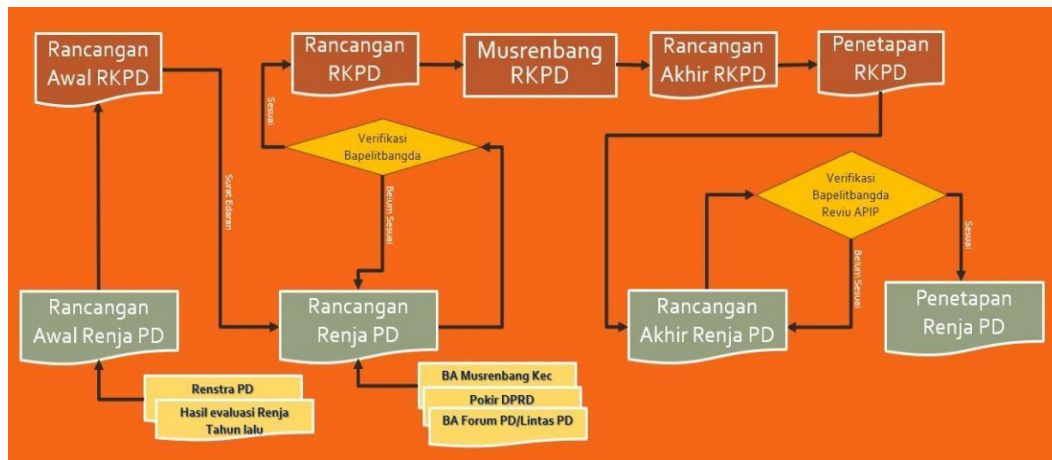
Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas , Kota Batam yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renja menjadi jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Dokumen ini memuat evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang urusan , strategi, program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditransformasikamelalui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Renja disusun dengan tahapan sebagaimana tergambar pada alur di bawah ini, sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan Renja;
- b. penyusunan rancangan awal Renja;

- c. pelaksanaan forum perangkat daerah;
- d. Perumusan rancangan akhir Renja;
- e. Penetapan Renja.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1 - Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

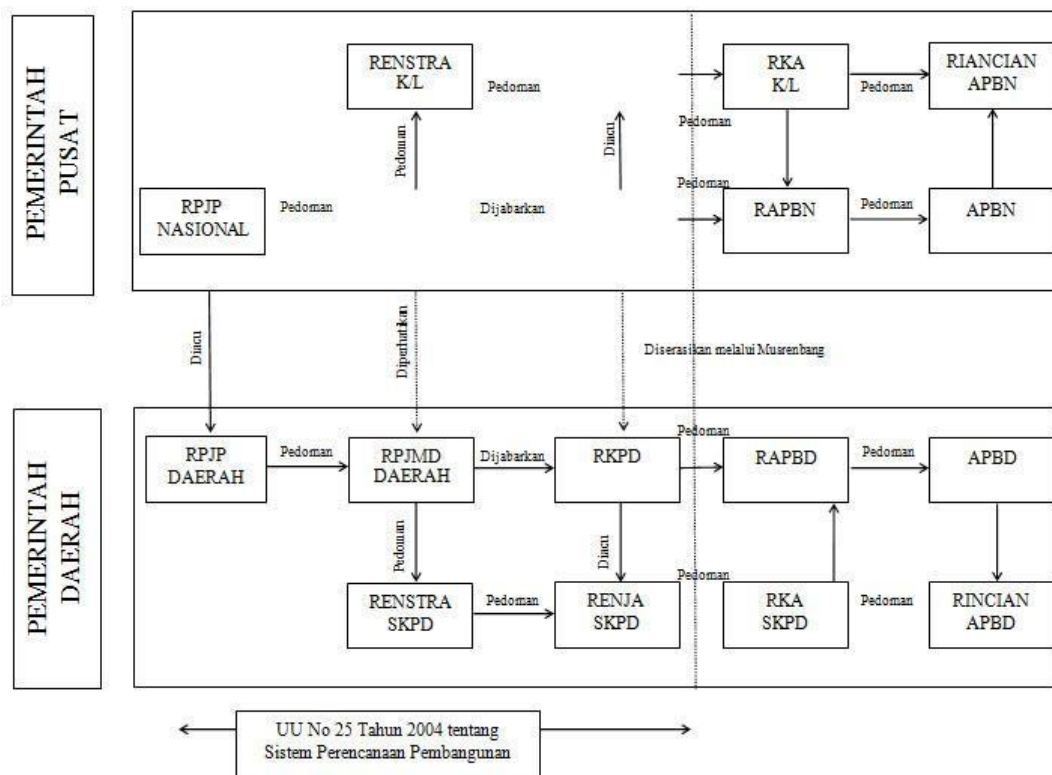
Adapun Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sementara itu Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun dengan tujuan mewujudkan pencapaian Misi Kota Batam yang ke-3 (Tiga) yaitu Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing , Berbudaya, Produktif dan

Berakhlak Mulia Adapun sasaran yang akan dicapai yaitu Menurunnya Masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2 - Keterkaitan Renja Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Batam No 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Permbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 127);
8. Peraturan Gubernur Provinsi kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 784);

9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1143).
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 83 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 1423)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada RKPD dan selaras dengan dokumen Renstra.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya; landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra,

analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2024 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2024, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 35.446.969.924,- Belanja Operasi sebesar Rp. 34.658.191.924,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 808.778.000,- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2024 terdapat pada tabel 1 (2.1) berikut :

Table 1 (2.1) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
	Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50.98%	50.98%
2.07.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	57%	57%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	49 orang/bulan	49 orang/bulan	46 orang/bulan	46 orang/bulan	100%	49 orang/bulan	49 orang/bulan	100%
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.07.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	63.64%	63.64%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 paket	66.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24 Paket	8 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	14 paket	58.33%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	4 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	8 paket	66.67%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	18 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	12 Dokumen	66.67%
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	42 Laporan	58.33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	21 Paket	2 Paket	-	-	-	-	2 Paket	9.52%
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 Unit	25 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	26 Unit	58 Unit	100%
2.07.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	52%	52%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 Laporan	24 laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	42 Laporan	58.33%
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	78 Laporan	26 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	46 Laporan	58.97%
2.07.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34.26%	34.26%
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 unit	17 unit	56.67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	345 Unit	81 Unit	161 Unit	161 Unit	100%	102 Unit	277 Unit	80.29%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 unit	1 unit	100%
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	100 %	100 %	-	-	-	-	100 %	100%
2.07.02.0.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-	-	20 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.02.0.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Buku/20 Dokumen	20 Dokumen	-	-	-	-	20 Dokumen	100%
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20.77%	13.34%	16.38%	16.24%	99.14%	18.32%	21.16%	100%
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	30.75%	18%	25.09%	139%	18%	76.81%	76.81%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	4081	544 orang	790 orang	1024 orang	100%	815 orang	3135 orang	76.81%
2.07.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	83,33%	28%	16.67%	16.67%	100%	16.67%	44.67%	53.61%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	60 Lembaga	20 Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga	100%	10 Lembaga	30 Lembaga	50%
2.07.03.2.05	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	2.16%	0.43%	0.38%	0.24%	63.15%	0.38%	0.86%	39.90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	6200 Dokumen	1260 Dokumen	667 Dokumen	667 Dokumen	100%	821 Dokumen	2475 Dokumen	39.92%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	54%	50%	51%	51%	100%	52%	44.01%	81.51%
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi	100%	-	11.76%	11.76%	100%	11.76%	29.41%	29.41%
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	85 Orang	-	10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	25 Orang	29.41%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	100%	17.56%	19%	13.51%	71.12%	20%	51.35%	51.35%
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	10000 perusaha an	2000 Orang	2000 Orang	2000 Orang	100%	1200 Orang	7000 Orang	70%
2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	4800 Orang	600 Orang	-	-	-	-	600 Orang	12.50%
2.07.04.2.04	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	100%	-	18.29%	18.29%	100%	18.29%	24.39%	24.39%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	1640 Orang	-	300 Orang	300 Orang	100%	300 Orang	400 Orang	24.39%
2.07.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA	100%	20%	-	-	-	-	-	-
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memperkerjakan TKA yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	100 Perusahaan	12 kali	-	-	-	-	-	-
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	99%	97%	97%	97%	100%	98%	96%	96.97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	50%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	60 Laporan	20 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	35 Laporan	58%
2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	99%	94%	97%	96%	100%	98%	96%	96.97%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kabupaten/Kota									
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Untuk melaksanakan urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan, dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2024 merencanakan 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2024:

Table 2 (2.2) Pencapaian Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n	Tahun n+1		Tahun n+2
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025		2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			15.12 %	16.38 %	18.32 %	19.59 %	13.34 %	16.53 %	21.16 %	18.32 %	19.59 %	20.77 %	Ketersediaan alokasi anggaran turut mempengaruhi ketercapaian target kegiatan.
1.1	Jumlah pencari kerja yang dilatih			727 orang	727 orang	727 orang	900 orang	544 orang	1024 orang	856 orang	727 orang	900 orang	1000 orang	
1.2	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi			1100 orang	1100 orang	1100 orang	1400 orang	630 orang	676 orang	548 Orang	1100 orang	1400 orang	1500 orang	
2	Persentase tenaga kerja yang terserap / ditempatkan			50%	51%	52%	53%	28.68 %	51%	52%	52%	53%	54%	Perlunya penguatan koordinasi lintas sektoral mengenai penempatan Naker.
3	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan			97%	97%	98%	98%	81.38 %	97%	56%	98%	98%	99%	Masih adanya pengusaha yang belum memaksimalkan proses mediasi.
4	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku			100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Urusan Ketenagakerjaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam, Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, maka tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Keberhasilan pembangunan pada bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana

tertuang dalam RPJMD, Misi III yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Kendala dan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Skill pencari kerja yang lebih rendah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.
2. Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal, sehingga minimnya kesempatan kerja.
3. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat berdiri suatu perusahaan, kurang terbinanya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak kepada timbulnya perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
4. Upah sektoral, Undang-Undang/Peraturan yang tidak memberikan ukuran tertentu mengenai upah sektoral dan besaran upah sektoral melalui kesepakatan yang sepenuhnya dilakukan kepada pihak pekerja dengan pengusaha.
5. Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur sering menimbulkan gejolak (demo pekerja) sehingga dapat mengganggu investasi.
6. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga mediator.
7. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja.
8. Banyak angkatan kerja dari luar Batam yang akhirnya menimbulkan tingginya angka pengangguran di Kota Batam.
9. Belum adanya pendampingan terhadap wirausaha baru
10. Belum optimalnya koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral dalam menangani masalah lowongan dan penempatan tenaga kerja.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan peningkatan kemampuan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri khususnya Kota Batam.
2. Memberikan informasi kerja melalui Bursa Kerja dan melakukan kerjasama dengan perusahaan.
3. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan ke Perusahaan.
4. Melakukan kajian tentang sektor unggulan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan membuat kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan.
5. Menetapkan struktur dan skala upah pekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni PP nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat mediator dan bimbingan teknis lainnya diluar daerah.
7. Melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja.
8. Mengalihkan pembangunan industri ke daerah lain hingga kesempatan kerja tidak hanya bisa didapat di Kota Batam.
9. Menyediakan pendampingan bagi wirausaha baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan berfungsi sebagai penyedia/membuka lapangan pekerjaan.
10. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral dalam menangani masalah lowongan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan Permenaker Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan menjadi isu utama di era automasi dan ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang dengan cepat. Baik peluang dan tantangan SDM dan ketenagakerjaan harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan Indonesia di era automasi dan ekonomi digital saat ini. Dengan melihat beberapa peluang sebagai berikut:

a. Booming Ekonomi Digital dan Automasi

Pemanfaatan teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif. Selanjutnya, dinamika ekonomi terkini juga direfleksikan dengan hadirnya era automasi. Era automasi yang diperkirakan akan melahirkan revolusi industri 4.0 ini berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari *resources-based* (berbasis sumber daya) menjadi *knowledge-based economy* (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Pergeseran terjadi seiring dengan kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan sementara itu disisi lain kekayaan intelektual jika dikelola dengan optimal akan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang tidak ada batasnya. Orang-orang di negara maju mencemaskan dampak teknologi terhadap pekerjaan.

Pekerjaan yang rutin memiliki kemungkinan tinggi untuk digantikan oleh mesin. Tetapi, teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif.

b. Angkatan Kerja Muda (Bonus Demografi)

Peluang pembangunan Ketenagakerjaan berikutnya adalah peningkatan penduduk usia kerja yang merupakan modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi kependudukan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan para calon pekerja dan anak-anak yang akan masuk pasar kerja agar mereka menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi, memiliki

keterampilan dan kompetensi untuk menghadapi persaingan global tenaga kerja baik di tingkat ASEAN (MEA) atau di dunia.

c. Perubahan Kebutuhan Keterampilan dan Model Pembelajaran.

Sebagai konsekuensi dari tren automasi dan tuntutan untuk berinovasi, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang mendalam. Di sisi lain, teknologi juga mendorong bertambahnya jenis dan jumlah pekerjaan yang sama kondisinya yaitu menuntut spesialisasi dan keahlian baru. Kebijakan ketenagakerjaan atau lebih luasnya kebijakan terkait dengan SDM harus dapat menjawab tantangan tersebut. Institusi pendidikan juga harus mulai mengubah arah orientasi kurikulum yang mampu mengimbangi dinamika tersebut. Peningkatan keahlian digital perlu diterapkan pada berbagai institusi pendidikan menengah dan Pemerintah harus memikirkan mekanisme pembiayaan yang layak. Pekerja lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran orang dewasa [adult learning] ketika ada jaminan akan kelangsungan pendapatan dan penerimaan kembali di pasar tenaga kerja. Mengingat pentingnya training yang dilakukan di tempat kerja, perusahaan perlu berkontribusi terhadap pembiayaannya. Dalam kasus dimana perusahaan menjalankan sendiri program training-nya, mereka bisa bekerja bersama dengan organisasi pekerja untuk mendesain kerangka yang relevan. Organisasi pekerja / buruh memiliki peran utama dalam ekosistem ini.

d. Potensi Pariwisata

Di tengah kelesuan ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang, sebenarnya masih terbuka peluang bagi Indonesia khususnya di Kota Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia untuk dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya.

Optimisme ini salah satunya muncul dari perkembangan positif yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia.

Terlepas dari berbagai kendala yang masih menghimpit, sektor pariwisata menjadi sektor yang semakin dapat diandalkan dalam upaya menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, serta

menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Dukungan dan strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengembangkan sektor ini ke depan akan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Perkembangan sektor perjalanan dan pariwisata semakin menggembirakan sejalan pemulihan ekonomi global dari krisis. Pertumbuhan sektor ini pun diperkirakan akan mengikuti bahkan akan menyamai sektor-sektor utama perekonomian dunia seperti sektor jasa keuangan maupun transportasi dan manufaktur. Keberadaan sektor pariwisata secara langsung dapat menggerakkan bisnis akomodasi, transportasi, hiburan, dan pertunjukan. Pariwisata juga membantu perkembangan industri jasa penginapan, jasa makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa transportasi, industri budaya, olahraga, dan jasa rekreasi.

Adapun tantangan yang harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan di Kota Batam di era automasi dan ekonomi digital saat ini :

a. Kualitas Angkatan Kerja

Kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Dinas Tenaga Kerja dalam mengejar produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0. Transformasi ke arah automasi, ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 membutuhkan keseriusan dalam peningkatan kualitas SDM. Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya angkatan kerja sangat berhubungan dengan bagaimana negara berinvestasi pada sumber daya manusianya. SDM menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam masa depan perekonomian.

b. Tantangan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong industri manufaktur tampak mengalami perbaikan. Industri manufaktur sebagai sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang baik (decent job) harus diakselerasi. Terutama meningkatkan high-

skilled labour. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang berdampak pada diperluasnya kesempatan kerja, industri akselerasi kompetensi pekerja di sektor industri perlu dilakukan.

c. Tantangan Hubungan Industrial

Era digital dan automasi telah mengubah cara bisnis dan industri beroperasi, mengelola, serta mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. Minim nya jumlah mediator dalam menangani perselisihan menjadi tantangan kedepan untuk mengkader dan memberikan diklat kepada calon mediator .

d. Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk menjawab tantangan keterampilan dan keahlian SDM tersebut, salah satu solusinya adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja selain dengan memberikan pelatihan kerja juga menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya. Dengan begitu diharapkan setelah mendapat bekal keterampilan berproduksi atau keahlian tertentu tersebut masyarakat dapat berwirausaha atau mencari kerja.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Tahun 2021-2024 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;

- e. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- g. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- h. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan rentan;
- j. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketenagakerjaan adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.
- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi isu strategis. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Menghadapi pasar kerja yang fleksibel ini salah satu hal yang

dapat dilakukan adalah peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja.

c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program/kegiatan Tenaga Kerja Kota Batam perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berikut adalah table 3 (2.3) review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

Table 3 (2.3) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam		100%	16.630.389.908	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam		100%	15.793.982.180	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.157.374.158	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.601.688.967	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Oran/ bulan	9.076.014.158	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Oran/ bulan	11.601.688.967	Penyesuaian Gaji ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.360.000	-		-	-	-	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				163.982.381	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				178.436.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	163.982.381	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	178.436.000	Peningkatan dan mutu kinerja pegawai
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				589.157.715	Administrasi Umum Perangkat Daerah				852.003.526	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Paket	5.627.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	5.627.000	

	Bangunan Kantor	Bangunan Kantor yang Disediakan			Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	115.546.965	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	153.963.000	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	312.273.750	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	105.895.000	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	157.446.098	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	280.119.000	Penyesuaian dengan kebutuhan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			316.280.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.554.501.400	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	77.644.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	53 Unit	115.564.000	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	238.636.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 Unit	244.249.000	Penyesuaian dengan kebutuhan
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	2 Unit	894.778.000	Penyesuaian dengan kebutuhan

						Lapangan yang Disediakan			
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.299.910.400	Penyesuaian dengan kebutuhan
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			767.357.979	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			480.846.760	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	254.961.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	227.124.600	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	512.396.379	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	253.722.160	Penyesuaian dengan kebutuhan
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			636.237.575	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			368.910.053	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	178.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	198.120.000	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	36.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	121.020.000	Penyesuaian dengan kebutuhan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	421.387.575	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.770.053	Rehabilitasi gedung

								bilitasi			
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Batam		100 %	122.356.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Batam		100 %	172.356.000	
7.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				122.356.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				172.356.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Dokumen		122.356.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Dokumen		172.356.000	
III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Batam		19.59 %	19.084.693.082	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Batam		19.59 %	23.469.678.553	
8.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				8.597.622.397	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				10.170.493.320	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	900 Orang		8.597.622.397	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	938 Orang		10.170.493.320	Meningkatkan kesempatan kerja
9.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				620.668.895	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta				200.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga		620.668.895	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga		200.000.000	
10.	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				250.000.000	-	-	-		-	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Keci	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan		250.000.000	-	-	-		-	Akan dilaksanakan pada tahun 2026
11.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				9.625.756.662	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				13.099.185.233	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran	1400 Dokumen		9.616.401.790	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran	1189 Dokumen		13.099.185.233	

			Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	men				Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	men		
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Batam		53%	528.546.524	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Batam		53%	1.018.351.024	
12.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				118.088.524	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				292.789.024	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	118.088.524	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	145.537.024	
						Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	50 Orang	58.891.000	
						Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	30 Orang	88.361.000	
13.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				221.908.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				537.012.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 Orang	121.908.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 Orang	121.908.000	
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job	2000 Orang	100.000.000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan	2000 Orang	415.104.000	Untuk memperluas

		Fair/Bursa Kerja				Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			kesempatan kerja
14.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			188.550.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			188.550.000	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	360 Orang	103.685.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	-	0	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	360 Orang	84.865.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	360 Orang	188.550.000	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Batam	98%	156.850.629	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Batam	98%	744.897.000	
12	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			79.749.289	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			434.868.000	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	79.749.289	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	357.744.000	Studi tiru terkait pengupahan
					Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan	200 Perusahaan	77.124.000	

						Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			
13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			77.101.340	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			310.029.000	
					Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	20 Perkar a	91.103.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lemba ga	77.101.340	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lemba ga	218.926.000	
T O T A L				31.522.836.143	T O T A L			41.199.264.757	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Table 4 (2.4) Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1.	Bimtek dan Sertifikasi Human Capital Supervisor level 4	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	21	Pokir Dewan
2.	Bimtek dan Sertifikasi Penata pembuatan perjanjian kerja level 4	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
3.	Bimtek dan Sertifikasi Promotor Produktivitas level 4	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
4.	Bimtek dan Sertifikasi Kepala bagian Remunerasi level 5	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
5.	Bimtek dan Sertifikasi Human Capital DIV head level 5	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
6.	Bimtek dan Sertifikasi Security Pratama	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	39	Pokir Dewan
7.	Bimtek dan Sertifikasi Ahli K3 Umum	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
8.	Bimtek dan Sertifikasi Security Madya	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	31	Pokir Dewan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
9.	Bimtek dan Sertifikasi AK3 Umum Madya	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
10.	Bimtek dan Sertifikasi Welder 3G SMAW/FCAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	11	Pokir Dewan
11.	Bimtek dan Sertifikasi Hiperkes Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
12.	Bimtek dan Sertifikasi k3 Migas (Operator)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
13.	Bimtek dan Sertifikasi Fitter Pipe	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
14.	Bimtek dan Sertifikasi Analisa Junior Admin Asisten HRD Pariwisata	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
15.	Bimtek dan Sertifikasi Pengawas K3 scaffolder	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
16.	Bimtek dan Sertifikasi UMKM	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	50	Pokir Dewan
17.	Bimtek dan Sertifikasi AK3 Umum Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
18.	Bimtek dan Sertifikasi Paramedis K3 Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
19.	Bimtek dan Sertifikasi "Human Capital Manager-Level 3"	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
20.	Bimtek dan Sertifikasi Front Office Supervisor	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	23	Pokir Dewan
21.	Bimtek dan Sertifikasi Instruktur	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
22.	Bimtek dan Sertifikasi Penyuluh Hubungan Industrial Jenjang IV	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
23.	Bimtek dan Sertifikasi "Human Capital Manager-Level 4"	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
24.	Bimtek dan Sertifikasi "Senior Human Capital Manager-Level 6"	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
25.	Bimtek dan Sertifikasi Pengelolaan Hubungan Industrial	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
26.	Bimtek dan Sertifikasi Jasa Web Deployment level I	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
27.	Bimtek dan Sertifikasi K3 Teknisi Listrik	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
28.	Bimtek dan Sertifikasi HRD Supervisor Jenjang 4	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Belum tersedia di SSH
29.	Bimtek dan Sertifikasi "General Manager SDM-Level 7"	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
30.	Bimtek dan Sertifikasi Penata Penyusunan Remunerasi Jenjang IV	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	23	Pokir Dewan
31.	Bimtek dan Sertifikasi Penata Penyelesaian Perselisihan Hub Industrial Jenjang IV	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	23	Pokir Dewan
32.	Bimtek dan Sertifikasi Tour Leader Wisata	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	25	Pokir Dewan
33.	Bimtek dan Sertifikasi Scaffolding	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	22	Pokir Dewan
34.	Bimtek dan Sertifikasi Operator Forklift	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
35.	Bimtek dan Sertifikasi Barista	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	18	Pokir Dewan
36.	Bimtek dan Sertifikasi Tour Guide	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	25	Pokir Dewan
37.	Bimtek dan Sertifikasi Food dan Beverage service Bartender	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	23	Pokir Dewan
38.	Bimtek dan Sertifikasi Analisa Pencegahan Perselisihan Hub Industrial	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	24	Pokir Dewan
39.	Bimtek dan Sertifikasi Tour Guide Wisata	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	30	Pokir Dewan
40.	Bimtek dan Sertifikasi SPA Terapis	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
41.	Bimtek dan Sertifikasi Welder 6G SMAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	12	Pokir Dewan
42.	Bimtek dan Sertifikasi Welder 6G FCAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	11	Pokir Dewan
43.	Bimtek dan Sertifikasi Welder 6G GTAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	12	Pokir Dewan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
44.	Bimtek dan Sertifikasi Welder 3G SMAW/FCAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	11	Pokir Dewan
45.	Bimtek dan Sertifikasi Pengukuran Produktivitas Jenjang V	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
46.	Bimtek dan Sertifikasi Welder 4G SMAW/FCAW	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	10	Pokir Dewan
47.	Pelatihan Operator K3 Migas	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
48.	Pelatihan Dasar K3 Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	23	Pokir Dewan
49.	Pelatihan Keselamatan Kerja K3 Madya	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
55.	Pelatihan HRD Pariwisata	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
51.	Pelatihan Accounting Level 1	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	16	Pokir Dewan
52.	Pelatihan Forklif	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
53.	Pelatihan Welding Inspector Basic	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	14	Pokir Dewan
54.	Pelatihan Welding Supervisor	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	13	Pokir Dewan
55.	Pelatihan Las 3G SMAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
56.	Pelatihan Welder 3G/4G	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	11	Pokir Dewan
57.	Pelatihan Las 4G SMAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	14	Pokir Dewan
58.	Pelatihan Las 4G FCAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	13	Pokir Dewan
59.	Pelatihan Las 5G SMAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	12	Pokir Dewan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
60.	Pelatihan Las 5G FCAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	12	Pokir Dewan
61.	Pelatihan Las 5G (PIPE) SMAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10	Pokir Dewan
62.	Pelatihan Welder 5G/6G	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	15	Pokir Dewan
63.	Pelatihan Las 6G SMAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
64.	Pelatihan Las 6G FCAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
65.	Pelatihan Welder Dasar	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
66.	Pelatihan Teknisi Jaringan Komputer	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
67.	Pelatihan Web Programming	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
68.	69.Pelatihan Autocad Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	23	Pokir Dewan
69.	Pelatihan Design Grafis Muda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
70.	Pelatihan Gerinda	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
71.	Pelatihan Scaffolding	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
72.	Pelatihan Menjahit Garmen	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
73.	Pelatihan Menjahit Garmen (Operator Junior)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
74.	Pelatihan Menjahit Baju Mode	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
75.	Pelatihan Menjahit Assisten Pembuat Pakaian Level 1	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
76.	Pelatihan Menjahit Pola Tingkat Dasar	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
77.	Pelatihan Jasa Boga Kue Nasional	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	33	Pokir Dewan
78.	Pelatihan Jasa Boga Pengolah Kue Indonesia & Oriental	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	34	Pokir Dewan
79.	Pelatihan Fitter Pipe	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
80.	Pelatihan Fitter Structure	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	18	Pokir Dewan
81.	Pelatihan Bahasa Korea	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	17	Pokir Dewan
82.	Pelatihan Rigger	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
83.	Pelatihan Bahasa Inggris	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	22	Pokir Dewan
84.	Pelatihan Las 3G FCAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	15	Pokir Dewan
85.	Pelatihan Operator Komputer	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan
86.	Pelatihan Bahasa Inggris/Asing Pariwisata	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	16	Pokir Dewan
87.	Pelatihan Tata Boga Pastry	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
88.	Pelatihan Security Pariwisata	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
89.	Pelatihan Las 1G (PLATE) SMAW	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah **"Indonesia yang mandiri, adil dan makmur"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.

- 2) RPJMN ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.
- 4) RPJMN ke-4 (2020-2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Oleh karena itu, tema RPJM 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang dituangkan ke dalam 7 misi atau agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan Dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Terdapat 5 (lima) misi Kota Batam Tahun 2021 - 2026 dimana yang terkait dengan Ketenagakerjaan adalah Misi ke - 3 yaitu :

Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan tujuan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran yaitu *Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran*. Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang bisa dilihat pada Tabel 5 (3.1) berikut:

Table 5 (3.1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam		Tingkat Pengangguran Terbuka	11,64 %	10,00 %	9,75 %	9,65 %	9,60 %	9,55 %
		Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Penurunan jumlah pengangguran	11,64 %	10%	9%	8%	7%	6%
			Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	96%	97%	97%	98%	98%	99%

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif berupa upaya kebijakan, strategis dan program pembangunan ketenagakerjaan dengan melihat kepada isu-isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan di Kota Batam.
2. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dalam mewujudkan ketenagakerjaan bekerja dan ketenagakerjaan berusaha.
4. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.
5. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Melihat dari isu-isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan seperti yang telah diuraikan diatas, didapatlah kebijakan pemecahan masalah ketenagakerjaan berdasarkan skala prioritas yang dituang dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Strategi pemecahan permasalahan masalah ketenagakerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.
2. Memberdayakan dan mendayagunakan angkatan kerja secara optimal dan manusiawi.
3. Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah.
5. Produktivitas tenaga kerja yang menggambarkan tenaga kerja daerah dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.
6. Efektifitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (industrial peace) sehingga dapat mendorong produktifitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.
7. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - 3) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - 1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/ Bursa Kerja
 - 3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

e. Program Hubungan Industrial

- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- 2) Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Rumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 yang bisa dilihat pada Tabel 3 (2.3) dan Tabel 7 (4.1) berikut terdapat perbedaan pagu yang cukup signifikan, dimana hal ini disebabkan beberapa keadaan sebagai berikut:

- ❖ Penambahan ASN (Pegawai PPPK)
- ❖ Penambahan aset karena perpindahan kantor ke gedung baru
- ❖ Rehabilitasi gedung kantor karena rusak berat
- ❖ Penambahan dari masing-masing bidang untuk perjalanan dinas keluar daerah
- ❖ Penambahan pagu kegiatan job fair untuk memperluas kesempatan kerja
- ❖ Perubahan nomenklatur sesuai KMDN terbaru

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 adalah berikut :

Table 6 (3.2) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	Batam	100%	15.793.982.180		100%	11.838.893.695
X	XX	1	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	11.601.688.967		100%	9.157.374.158
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		61 Orang/ Bulan	11.601.688.967		61 Orang/ Bulan	9.157.374.158
X	XX	1	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		100%	178.436.000		100%	363.982.381
X	XX	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11 Orang	178.436.000		20 Orang	363.982.381

X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.627.000		1 Paket	5.627.000
X	XX	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	153.963.000		4 Paket	115.546.965
X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	60.395.000		-	0
X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	105.895.000		2 Paket	312.273.750
X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3.600.000		3 Dokumen	3.600.000
X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	280.119.000		12 Laporan	157.446.098
X	XX	1	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	2.554.501.400		100%	238.636.100

X	XX	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	894.778.000		-	0
X	XX	1	207	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		53 Unit	115.564.000		-	0
X	XX	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		26 Unit	244.249.000		9 Unit	238.636.100
X	XX	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1.299.910.400		-	0
X	XX	1	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	480.846.760		100%	767.357.979
X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	227.124.600		12 Laporan	254.961.600
X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	253.722.160		13 Laporan	512.396.379
X	XX	1	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang		100%	368.910.053		100%	717.049.264

					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dipelihara dalam kondisi baik						
X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		5 Unit	198.120.000		5 Unit	178.510.000
X	XX	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		174 Unit	121.020.000		102 Unit	72.680.000
X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1 Unit	49.770.053		1 Unit	465.859.264
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam Buku		100%	172.356.000		-	0
2	7	2	1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun		100%	172.356.000		-	0
2	7	2	1	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		20 Dokumen	172.356.000		-	0
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		19,59%	23.469.678.553		20,77%	19.815.636.827

2	7	3	201		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		22%	10.170.493.320		25%	9.509.782.245
2	7	3	201	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		938 Orang	10.170.493.320		1000 orang	9.509.782.245
2	7	3	202		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi		16,67%	200.000.000		16,67%	758.039.680
2	7	3	202	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina		10 Lembaga	200.000.000		10 Lembaga	758.039.680
2	7	3	204		Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mengikuti program konsultasi		-	0		20%	250.000.000
2	7	3	204	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		-	0		100 Perusahaan	250.000.000
2	7	3	205		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi		0,49%	13.099.185.233		0,52%	9.297.814.902
2	7	3	205	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1189 Dokumen	13.099.185.233		1500 Dokumen	9.297.814.902

2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan		53%	1.018.351.024		54%	548.789.856
2	7	4	201		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultansi		29,41%	292.789.024		35,29%	138.331.856
2	7	4	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		50 Orang	58.891.000		-	0
2	7	4	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		25 Orang	145.537.024		30 orang	138.331.856
2	7	4	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		30 Orang	88.361.000		-	0
2	7	4	203		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti		25%	537.012.000		50%	221.908.000

						pencari kerja						
2	7	4	203	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		2000 Orang	121.908.000		2000 Orang	221.908.000
2	7	4	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja		1200 Orang	415.104.000		-	0
2	7	4	204		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI		21,95%	188.550.000		21,95%	103.685.000
2	7	4	204	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		360 orang	188.550.000		380 orang	103.685.000
2	7	4	204	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangan		0	0		380 orang	84.865.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian		98%	744.897.000		99%	162.858.008

						masalah ketenagakerjaan						
2	7	5	201		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	434.868.000		100%	81.049.942
2	7	5	201	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		200 Perusahaan	77.124.000		-	0
2	7	5	201	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		10 Laporan	357.744.000		10 Laporan	81.049.942
2	7	5	202		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial		98%	310.029.000		99%	81.808.066

					Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota							
2	7	5	202	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		20 Perkara	91.103.000		-	0
2	7	5	202	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	218.926.000		1 Lembaga	81.808.066
							Total		41.199.264.757	Total		32.366.178.386

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dengan tetap memperhatikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2025 tetap merujuk pada target RPJMD Kota Batam Tahun 2025, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan pekerja di Kota Batam oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Ada 5 Program, 15 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 41.199.264.757,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagaimana tabel 7 (4.1) dibawah ini :

Table 7 (4.1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	Batam	100%	15.793.982.180		100%	11.838.893.695
X	XX	1	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	11.601.688.967		100%	9.157.374.158
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		61 Orang/Bulan	11.601.688.967		61 Orang/Bulan	9.157.374.158
X	XX	1	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		100%	178.436.000		100%	363.982.381
X	XX	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		11 Orang	178.436.000		20 Orang	363.982.381
X	XX	1	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	609.599.000		100%	594.493.813

X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	5.627.000		1 Paket	5.627.000
X	XX	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	153.963.000		4 Paket	115.546.965
X	XX	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	60.395.000		-	0
X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	105.895.000		2 Paket	312.273.750
X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		3 Dokumen	3.600.000		3 Dokumen	3.600.000
X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	280.119.000		12 Laporan	157.446.098
X	XX	1	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	2.554.501.400		100%	238.636.100
X	XX	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	894.778.000		-	0

X	XX	1	207	2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		53 Unit	115.564.000		-	0
X	XX	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		26 Unit	244.249.000		9 Unit	238.636.100
X	XX	1	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	1.299.910.400		-	0
X	XX	1	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	480.846.760		100%	767.357.979
X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	227.124.600		12 Laporan	254.961.600
X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	253.722.160		13 Laporan	512.396.379
X	XX	1	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik		100%	368.910.053		100%	717.049.264
X	XX	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		5 Unit	198.120.000		5 Unit	178.510.000
X	XX	1	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang		174 Unit	121.020.000		102 Unit	72.680.000

						Dipelihara						
X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		1 Unit	49.770.053		1 Unit	465.859.264
2	7	2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Data dan Informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam Buku		100%	172.356.000		-	0
2	7	2	1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang disusun		100%	172.356.000		-	0
2	7	2	1	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro		20 Dokume n	172.356.000		-	0
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		19,59%	23.469.678.553		20,77%	19.815.636.827
2	7	3	201		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan		22%	10.170.493.320		25%	9.509.782.245
2	7	3	201	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		938 Orang	10.170.493.320		1000 orang	9.509.782.245
2	7	3	202		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi		16,67%	200.000.000		16,67%	758.039.680

2	7	3	202	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina		10 Lembaga	200.000.000		10 Lembaga	758.039.680
2	7	3	204		Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mengikuti program konsultasi		-	0		20%	250.000.000
2	7	3	204	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		-	0		100 Perusahaan	250.000.000
2	7	3	205		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi		0,49%	13.099.185.233		0,52%	9.297.814.902
2	7	3	205	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		1189 Dokumen	13.099.185.233		1500 Dokumen	9.297.814.902
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan		53%	1.018.351.024		54%	548.789.856
2	7	4	201		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi		29,41%	292.789.024		35,29%	138.331.856
2	7	4	201	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-		50 Orang	58.891.000		-	0

						lain untuk Peningkatan Kompetensi						
2	7	4	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		25 Orang	145.537.024		30 orang	138.331.856
2	7	4	201	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		30 Orang	88.361.000		-	0
2	7	4	203		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja		25%	537.012.000		50%	221.908.000
2	7	4	203	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		2000 Orang	121.908.000		2000 Orang	221.908.000
2	7	4	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja		1200 Orang	415.104.000		-	0
2	7	4	204		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI		21,95%	188.550.000		21,95%	103.685.000
2	7	4	204	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia(PMI)/ Pekerja	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		360 orang	188.550.000		380 orang	103.685.000

					Migran Indonesia (PMI)							
2	7	4	204	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangan		0	0		380 orang	84.865.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan		98%	744.897.000		99%	162.858.008
2	7	5	201		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	434.868.000		100%	81.049.942
2	7	5	201	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		200 Perusahaan	77.124.000		-	0
2	7	5	201	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		10 Laporan	357.744.000		10 Laporan	81.049.942

2	7	5	202		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial		98%	310.029.000		99%	81.808.066
2	7	5	202	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		20 Perkara	91.103.000		-	0
2	7	5	202	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	218.926.000		1 Lembaga	81.808.066
							Total		41.199.264.757	Total		32.366.178.386

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2025 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2025 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran dan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2025 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian indikator kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.
3. Dari review rancangan awal RKPD terhadap Rancangan akhir RKPD terdapat perubahan pagu anggaran yang cukup signifikan pada sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dimana hal ini sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat bahwa gedung, halaman parkir dan pagar Kantor Dinas Tenaga Kerja sudah rusak berat dan tidak layak lagi dipergunakan sebagai gedung pemerintah.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Program dan kegiatan pada Renja Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai amanat peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Batam terhadap perencanaan dan pelaksanaan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien;
3. Adanya peningkatan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas yang semakin kompleks dengan upaya melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur baik melalui luring maupun daring;
4. Dalam menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, maka seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Batam secara berjenjang, bertanggung jawab dan wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2025.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Rancangan Akhir Renja Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam Tahun 2025

